



# RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN), bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD dan keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, *bottom up planning* serta *top down planning*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Kami mengharapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas terutama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian kami menyadari Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang obyektif kami harapkan guna terwujudnya Rencana Kerja yang lebih baik di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, Agustus 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**DEDY NOERHASAN, ST.,M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710209 199803 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    LANDASAN HUKUM.....	4
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.4    SISTEMATIKA .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>12</b>
2.1    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	12
2.2    ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	27
1.    PENCAPAIAN AIR BERSIH/AIR MINUM.....	31
2.    PENCAPAIAN SANITASI .....	31
3.    PENCAPAIAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI .....	32
2.3    ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	33
2.4    REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	34
2.5    PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	42
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>43</b>
3.1    TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	43
3.2    TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN .....	50
3.3    PROGRAM DAN KEGIATAN .....	51
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja SKPD disusun guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD.

Proses penyusunan Renja SKPD, Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra - SKPD ) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ).

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pelaku dari pelaksana seluruh kegiatan organisasi dari tingkat perencanaan , pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, juga merupakan salah satu faktor bagi

kelangsungan hidup bangsa dimasa yang akan datang khususnya Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja-SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2023.

Program, kegiatan, alokasi dan indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada SPM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- A. Persiapan penyusunan Renja meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja; penyusunan agenda tim penyusun Renja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- B. Penyusunan rancangan Renja mencakup :
  1. Perumusan yang meliputi persiapan penyusunan rancangan Renja, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Banyumas, perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan masyarakat; dan perumusan kegiatan prioritas.
  2. Penyajian rancangan Renja Perubahan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
    - a. pendahuluan;
    - b. evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
    - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
    - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra;
    - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
    - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
    - g. penutup.

c. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD membahas Pembahasan rancangan Renja RKPD kabupaten mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan;
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kabupaten Banyumas dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk DINPERKIM Kabupaten Banyumas.

d. Penetapan Renja SKPD

Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas menyempurnakan rancangan Renja dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan kemudian diverifikasi.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;



13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah membuat dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2023 sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2023.

#### **B. Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
2. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni .

3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat

## **1.4 SISTEMATIKA**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 , yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar**

##### **Belakang**

Memuat pengertian ringkas tentang Rencana Kerja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan perencanaan, SOTK SKPD, kewenangan SKPD, serta pedoman lain yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,**

Berisikan uraian tentang tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Memuat : (1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; (2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; (3)

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Memuat tentang kajian kebijakan pembangunan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra .

### **3.3 Program dan kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai factor-factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Diamanat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2021 meliputi tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun 2021 pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan implementasi dari program dan kegiatan pada tahun 2021, sebagai materi bagi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di tahun 2022.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2021, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas yang ingin dicapai;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2021, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Prakiraan Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- c. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan;
- d. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi sesuai indikator RPJMD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai dalam tabel 2.1. berikut :



Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021

Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
			K	R p	K	R p	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		1		2		3		4		K	%	K	R p	K	R p		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
[TUJUAN] Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat																												
[INDTUJUAN]	Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	76,19		N/A	73,80		73,80		73,80		72.8		73		73.5		75.99		102.97					0			
[SASARAN] Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman																												
[INDSASARAN]	Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	76,19		N/A	73,80		73,80		73,80		72.8		73		73.5		75.99		102.97					0			
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							10.911.427.000		10.911.427.000		10.911.427.000		51.925.000		2.386.899.299		4.156.237.610		4.240.099.401		99.3							
[INDPROGRAM]	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/kota	%	77.08		75.45	74.46		74.46		74.46		75.45		75.45		75.45		75.51		101.41					75.45		97.89	
[KEGIATAN] Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air							10.911.427.000		10.911.427.000		10.911.427.000		51.925.000		2.386.899.299		4.156.187.610		4.170.864.902		98.67							

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021												Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
																			1		2		3		4							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp														
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																																
[INDKEGIATAN]	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM yang dilaksanakan	Lokasi	84		20		28		28		28		8		8		8		6		107.14		50		59.52							
[SUBKEGIATAN]	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM						84.995.000		84.995.000		84.995.000				21.838.500		3.293.210		27.129.460		61.49											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan SPAM	Kali	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100							
[SUBKEGIATAN]	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						1.135.000.000		1.135.000.000		1.135.000.000								1.134.629.000		99.97											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lokasi SPAM di Kawasan Perdesaan yang dibangun	Lokasi	12		4		4		4		4		1		1		1		1		100		8		66.67							
[SUBKEGIATAN]	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						9.691.432.000		9.691.432.000		9.691.432.000		51.925.000		2.365.060.799		4.152.894.400		3.009.106.442		98.84											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lokasi SPAM di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan/diperbaiki	Lokasi	72		24		24		24		24		6		6		6		8		108.33		50		69.44							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terpelihara/diperbaiki	Lokasi	3		1		1		1		1		0		0		1		0		100		2		66.67							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah BP SPAM yang dibina	Kelompok	5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100							
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							16.374.309.726		16.374.309.726		16.374.309.726		105.523.000		4.711.755.793		6.515.753.683		4.906.232.489		99.18											
[INDPROGRAM]	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	92		88.45		88		88		88		88.45		88.45		88.45		88.83		100.94		88.45		96.14							
[KEGIATAN] Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							16.374.309.726		16.374.309.726		16.374.309.726		105.523.000		4.711.755.795		6.357.638.683		4.542.470.498		95.99											

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021					
															1		2		3		4											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp														
[INDEKGIATAN]	Jumlah sarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki	Lokasi	141		55		47		47		47		12		12		15		5		93.62		99		70.21							
[SUBKEGIATAN]	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						135.070.325		135.070.325		135.070.325				9.145.000				104.026.750		83.79											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah yang disusun	Dokumen	150		50		50		50		50		10		15		15		10		100		100		66.67							
[SUBKEGIATAN]	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						16.172.984.401		16.172.984.401		16.172.984.401		105.523.000		4.700.655.795		6.357.638.683		4.379.198.748		96.1											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana Air Limbah yang dibangun	Lokasi	141		47		47		47		47		12		12		15		5		93.62		91		64.54							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Tangki Septik (TS) yang dibangun	Unit	7140		2380		2380		2380		2380		650		650		750		330		100		4760		66.67							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah BP SPALD yang dibina	Kelompok	5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah IPAL yang terpelihara/ditingkatkan	Unit	3		1		1		1		1		0		0		1		0		100		2		66.67							
[SUBKEGIATAN]	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja						12.169.075		12.169.075		12.169.075				1.955.000				5.450.000		60.85											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Jasa Penyedotan Lumpur Tinja yang ditangani	Bulan	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100							
[SUBKEGIATAN]	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT						54.085.925		54.085.925		54.085.925								53.795.000		99.46											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pemeliharaan IPLT yang dilaksanakan	Bulan	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100							
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							1.291.239.000		1.291.239.000		1.291.239.000				4.600.000		431.898.000		835.657.000		98.52											
[INDPROGRAM]	Persentase panjang drainase	%	11.63		11.38		11.53		11.53		11.53		11.38		11.38		11.38		11.69		101.39		11.38		97.85							

Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan,sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021					
															1		2		3		4											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp														
	lingkungan kondisi baik																															
[KEGIATAN] Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.291.239.000		1.291.239.000		1.291.239.000			4.600.000		431.898.000		827.577.000			97.9											
[INDKEGIATAN]	Jumlah Saluran Drainase yang dikembangkan	Lokasi	30		15			10		10		10		2		3		5		1		110		26		86.67						
[SUBKEGIATAN] Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan							1.291.239.000		1.291.239.000		1.291.239.000			4.600.000		431.898.000		827.577.000			97.9											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Saluran Drainase yang dibangun	Lokasi	30		15			10		10		10		2		3		5		1		110		26		86.67						
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							14.894.996.000		14.894.996.000		14.894.996.000			28.447.500		5.451.553.597		9.312.062.392			99.31											
[INDPROGRAM]	Rasio Permukiman Layak Huni	%	80.10		79.813		79.90		79.90		79.90		79.813		79.813		79.89		99.99		79.813		79.813		99.64							
[KEGIATAN] Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							14.894.996.000		14.894.996.000		14.894.996.000			28.447.500		5.448.366.597		9.015.053.582			97.29											
[INDKEGIATAN]	Jumlah Infrastruktur Permukiman yang tersedia	Unit	285		35			95		95		95		15		50		30		28		129.47		158		55.44						
[SUBKEGIATAN] Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							14.894.996.000		14.894.996.000		14.894.996.000			28.447.500		5.448.366.597		9.015.053.582			97.29											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Infrastruktur Permukiman yang dikembangkan/ditingkatkan	Unit	285		95			95		95		95		15		50		30		28		129.47		218		76.49						
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.792.053.054		7.792.053.054		7.792.053.054		1.392.285.689		2.249.711.954		1.527.140.311		2.418.355.631			97.37										
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi	%	100		100			100		100		100		25		50		75		100		100		100		100						

Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021					
															1		2		3		4											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp														
	Keuangan Perangkat Daerah																															
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		25		50		75		100		100		100		100					
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100		100		100		100		100		100		25		50		75		100		100		100		100					
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		25		50		75		100		100		100		100					
[KEGIATAN] X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						96.754.565		96.754.565		96.754.565		29.487.789				400.000		35.100.324				67.17									
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	35		35		35		35		35		5		10		25		35		100		35		100							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						31.604.900		31.604.900		31.604.900		8.283.900				7.225.000					49.07										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	30		30		30		30		30		5		15		25		30		100		30		100							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						65.149.665		65.149.665		65.149.665		21.203.889				400.000		27.875.324				75.95									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5		5		5		5		5		2		3		4		5		100		5		100							
[INDSUBKEGIATAN]	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	24		24		24		24		24		6		12		18		24		100		24		100							
[INDSUBKEGIATAN]																																
[KEGIATAN] X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.175.529.980		10.175.529.980		10.175.529.980		2.282.318.978		2.996.028.084		2.214.663.668		1.930.504.892				185.22									
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi	Jenis	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100							

Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021					
															1		2		3		4											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp														
	keuangan yang dikelola																															
[INDKEGIATAN]	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12		12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100					
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.019.064.990		5.019.064.990		5.019.064.990		1.141.159.489		1.476.720.042		1.103.731.834		942.564.446			92.93										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		100		50		100					
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						68.700.000		68.700.000		68.700.000		21.294.000		3.600.000		22.688.000					69.26										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100					
[KEGIATAN] X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						365.841.499		365.841.499		365.841.499		146.459.320		4.700.000		128.310.263					76.39										
[INDKEGIATAN]	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor						10.948.102		10.948.102		10.948.102		985.000				8.147.000					83.41										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	75		25		25		25		25		5		10		5		5		100		50		66.67							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						161.000.000		161.000.000		161.000.000		62.310.068		2.000.000		42.829.465					66.55										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						19.645.000		19.645.000		19.645.000		3.082.000				6.247.750					47.49										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	750		250		250		250		250		50		100		50		50		100		500		66.67							

Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021					
													1		2		3		4											
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp
													DPA INDIK		DPA PERUBAHAN		K		Rp								K		Rp	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	36000		12000		12000		12000		12000		3000		3000		4000		2000		100		24000		66.67					
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						174.248.397		174.248.397		174.248.397				80.082.252		2.700.000		71.086.048		88.3									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	36		36		36		36		36		9		18		27		36		100		36		100					
[KEGIATAN] X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						173.500.000		173.500.000		173.500.000				83.940.000				46.816.000		75.36									
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	63		12		21		21		21		3		6		9		3		100		33		52.38					
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						50.000.000		50.000.000		50.000.000				49.740.000						99.48									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	45		22		15		15		15		0		0		15		0		100		37		82.22					
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						123.500.000		123.500.000		123.500.000				34.200.000				46.816.000		65.6									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	18		6		6		6		6		0		0		6		3		150		15		83.33					
[KEGIATAN] X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.773.142.000		1.773.142.000		1.773.142.000		250.718.200		464.851.491		399.439.600		308.466.984		80.28									
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100					
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						165.079.200		165.079.200		165.079.200				62.744.391		1.600.000		46.490.584		67.14									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100					

Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021												Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
																			1		2		3		4							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
															K	Rp	K	Rp														
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							1.608.062.800		1.608.062.800		1.608.062.800		250.718.200		402.107.100		397.839.600		261.976.400		81.63											
[INDSUBKEGIATAN]	Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	jasa	57		57		57		57		57		57		57		57		57		100		57		100							
[KEGIATAN] X.XX.01.2.09.01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							295.050.000		295.050.000		295.050.000				43.759.312		1.200.000		174.271.646		74.3											
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1		1		1		1		1		1		1		1		1		100		1		100							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							123.800.000		123.800.000		123.800.000				28.239.312		1.200.000		47.396.646		62.06											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	27		27		27		27		27		27		27		27		27		100		27		100							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel							7.500.000		7.500.000		7.500.000				990.000				6.470.000		99.47											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	12		12		12		12		12		12		12		12		12		100		12		100							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							63.750.000		63.750.000		63.750.000				14.530.000				21.110.000		55.91											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	125		125		125		125		125		125		125		125		125		100		125		100							
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							100.000.000		100.000.000		100.000.000								99.295.000		99.3											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1		1		1		1		1		1		1		1		1		100		1		100							
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang																																



Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan,sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021					
															1		2		3		4											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp														
[INDTUJUAN]	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99.9 85		99.9 82		99.9 83			99.9 83		99.9 83		99.9 82		99.9 82		99.9 83		99.9 83		100		99.9 82		100						
[SASARAN]	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW																															
[INDSASARAN]	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99.9 85		99.9 82		99.9 83			99.9 83		99.9 82		99.9 82		99.9 82		99.9 82		99.9 83		100		99.9 82		100						
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								890.930.1 00		890.930.1 00		890.930.1 00		15.300.00 0		156.333.1 00		175.372.1 00		511.531.9 00		96.3 6										
[INDPROGRAM]	Presentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan	%	100		100		100			100		100		100		100		100		100		100		100		100						
[KEGIATAN] Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota								374.097.9 50		374.097.9 50		374.097.9 50		10.200.00 0		75.429.95 0		5.703.000		227.489.2 00		85.2 2										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	Doku men	1		1		1			1		1		1		1		1		1		100		1		100						
[SUBKEGIATAN] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota								374.097.9 50		374.097.9 50		374.097.9 50		10.200.00 0		75.429.95 0		5.703.000		227.489.2 00		85.2 2										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Persyaratan Pengajuan Persetujuan Substansi Menteri yang di setujui	Doku men	2		2		2			2		2		1		1		1		2		100		2		100						
[KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								378.350.7 60		378.350.7 60		378.350.7 60		5.100.000		26.359.00 0		147.618.0 00		172.431.0 00		92.9 1										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	Doku men	1		1		1			1		1		1		1		1		1		100		1		100						

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021			
															1		2		3		4									
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDIK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
													K	Rp	K	Rp														
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota							378.350.760		378.350.760		378.350.760		5.100.000		26.359.000		147.618.000		172.431.000		92.91									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen penyusunan materi teknis RRTR yang tersedia	Dokumen	3		3		3		3		3		1		1		2		3		100		3		100					
[KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							49.069.390		49.069.390		49.069.390				12.727.150		3.008.000		25.988.000		85.03									
[INDKEGIATAN]	Jumlah Pelayanan Informasi Tata Ruang yang tersedia	Dokumen	4000			2000		2000		2000		500		500		500		500		500		100		2000	50					
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah							49.069.390		49.069.390		49.069.390				12.727.150		3.008.000		25.988.000		85.03									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen keterangan rencana daerah (KRD) yang diterbitkan	Dokumen	4000		2000		2000		2000		2000		500		500		500		500		100		4000		100					
[KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							89.412.000		89.412.000		89.412.000				40.017.000		7.877.500		19.595.000		75.48									
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Pelanggaran Tata Ruang yang disusun	Dokumen	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100					
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							89.412.000		89.412.000		89.412.000				40.017.000		7.877.500		19.595.000		75.48									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen pengendalian/rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan	Dokumen	12		12		12		12		12		3		6		9		12		100		12		100					
[SASARAN] Menurunnya pelanggaran tata ruang																														
[INDSASARAN]	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0.015		0.018		0.017		0.017		0.017		0.018		0.017		0.017		0.017		100		0.018		80					
[PROGRAM] PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							186.804.640		186.804.640		186.804.640		400.000		89.204.135		7.540.000		64.315.440		86.43									

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021					
															1		2		3		4											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp														
[INDPROGRAM]	Persentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	%	39.47		50.33		38.83		38.83		38.83		50.33		50.33		50.33		50.97		131.26		50.33		127.51							
[KEGIATAN]	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						186.804.640		186.804.640		186.804.640		400.000		89.204.135		7.540.000		77.018.000		93.23											
[INDKEGIATAN]	Jumlah Bidang Tanah milik Pemkab yang bersertifikat	Sertifikat	60		20		20		20		20		2		6		7		5		100		40		66.67							
[SUBKEGIATAN]	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						186.804.640		186.804.640		186.804.640		400.000		89.204.135		7.540.000		77.018.000		93.23											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Sertifikat dan Rekomendasi Teknis IPPPT yang diterbitkan	Dokumen	60		30		20		20		20		2		6		7		5		100		50		83.33							
[TUJUAN]	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni																															
[INDTUJUAN]	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	%	100		N/A		100		100		100														0							
[INDTUJUAN]	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	88.17		85.20		86.17		86.17		86.17		85.2		86		86.05		86.13		99.95		85.2		96.63							
[SASARAN]	Meningkatnya jumlah rumah layak huni																															
[INDSASARAN]	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	77.58		78.76		77.07		77.07		77.07		78.76		78.76		78.76		79.17		102.72		78.76		101.52							
[PROGRAM] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							6.768.112.650		6.768.112.650		6.768.112.650		13.000.000		3.262.284.000		2.708.500.000		733.236.424		99.25											
[INDPROGRAM]	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	%	9.75		0.44		7.31		7.31		7.31		0.44		0.44		2.84		6.12		83.72		0.44		4.51							
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan	Lokasi	9		0		1		1		1		0		0		0		1		100		1		11.11							



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra SPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		1		2		3		4		K	%	K	Rp	K	Rp			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
																											K	%	K
[INKEGIATAN]	Jumlah Lingkungan dengan PSU Baik	Lokasi	60		20		20		20		20		2		6		7		18		165		53		88.33				
[SUBKEGIATAN]	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						31.311.000		31.311.000		31.311.000				5.630.000				24.276.000		95.51								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Pengembangan Perumahan yang disusun	Dokumen	30		10		10		10		10		2		3		3		2		100		20		66.67				
[SUBKEGIATAN]	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						30.000.000		30.000.000		30.000.000				5.939.000		1.700.000		9.222.125		56.2								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah PSU yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	Lokasi	60		20		20		20		20		2		6		7		18		165		53		88.33				
[SASARAN]	Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana																												
[INDSASARAN]	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	%	100		N/A		100		100		100		0		0		0		0						0				
[INDPROGRAM]	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	100		N/A		0		0		0		0		0		0		0						0				
[INKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana	Dokumen	1		0		0		0		0		0		0		0		0						0				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pendataan Rumah Korban Bencana	Rumah	10		0		0		0		0		0		0		0		0						0				
[INKEGIATAN]	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Rumah Korban Bencana	Kali	4		0		0		0		0		0		0		0		0						0				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sosialisasi Tanggap Bencana	Kali	4		0		0		0		0		0		0		0		0						0				

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah, Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b) pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c) pembinaan dan/atau fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d) supervisi dan/atau monitoring kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang

pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- e) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- f) evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinperkim Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. *Kepala Dinas*
2. *Sekretariat*, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. *Bidang Penataan Ruang*, terdiri dari :
  - a) Seksi Pemanfaatan Ruang
  - b) Seksi Pengendalian Ruang
  - c) Seksi Pertanahan
4. *Bidang Pengembangan Permukiman*, terdiri dari
  - a) Seksi Pengelolaan Permukiman
  - b) Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
5. *Bidang Penyehatan Lingkungan*, terdiri dari :

- a) Seksi Air Minum
  - b) Seksi Air Limbah Domestik
6. *Bidang Pengembangan Perumahan*, terdiri dari :
- a) Seksi Pembangunan Perumahan
  - b) Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan
7. *UPTD PALD*
8. *Kelompok Jabatan Fungsional*



**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 50.323.748.991 terurai dalam 11 program, 21 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

**Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun 2021**

NO.	INDIKATOR	TARGET IKK	TARGET (%)		REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Penduduk Berakses Air Minum	57.86	73.37	74.46	75.45	75.51	102.83	101.41
2.	Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	86.00	86.00	88.00	88.45	88.83	102.84	100.94
3.	Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan	8.16	8.16	8.05	7.80	7.15	104.08	111.00
4.	Luas Permukiman yang Tertata	6.09	6.09	7.31	0.44	6.12	7.22	83.7
5.	Rumah Layak Huni	76.81	76.81	77.07	78.76	79.17	102.53	102.72
6.	Luas Bidang Bersertifikat	38.51	38.51	38.83	50.33	50.97	130.69	131.26
7.	Penyelesaian Izin Penetapan Lokasi	100	100	100	100	100	100	100

## 1. **PENCAPAIAN AIR BERSIH/AIR MINUM**

Mulai tahun 2020, Indikator “*Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih*”, dijadikan satu dengan Indikator “*Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum*”. Karena Data Dukung yang ada di Bidang Penyehatan Lingkungan antara Air Bersih dan Air Minum sama dan tidak bias dipisahkan satu dengan lainnya.

Indikator “*Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih/Air Minum*”, telah mencapai 76,54% dari target sebesar 74,46% atau sebanyak 1.305.470 jiwa dari total jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebanyak 1.705.606 jiwa telah mengakses air bersih/air minum. Kinerja sektor air bersih/air minum cukup baik, hal ini dikarenakan sinergi yang terbangun oleh *stakeholder* sangat kuat dan saling melengkapi, misalnya mengenai pembagian wilayah kerja, PDAM lebih fokus pada pelayanan masyarakat perkotaan dan juga masyarakat berpenghasilan rendah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengandalkan APBD dan DAK Air minum melayani masyarakat perdesaan. Sementara dari CSR (***Corporate Social Responsibility***) masih perlu digali dalam upaya mendukung program penyediaan air bersih untuk masyarakat.

## 2. **PENCAPAIAN SANITASI**

Sampai dengan akhir tahun 2021 Indikator “*Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi*” mampu melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88,83% dari target 86,00% atau 404.666 rumah tangga dari total rumah tangga sebanyak 455.551. Meningkatnya progres indikator ini ditunjang oleh Kegiatan DAK Sanitasi yang pada tahun 2021 memberikan kontribusi yaitu sebesar 4.754.600.000 M dengan 23 lokasi Kegiatan dan juga Hibah Air Limbah Setempat (HALS) sebesar

10.066.500.000 M dengan 25 Lokasi tersebar keseluruhan Desa/Kelurahan Kab Banyumas.

### **3. PENCAPAIAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI**

Capaian Permukiman Kumuh yang Tertangani tahun 2019 telah tercapai 100%, artinya SK Bupati Nomor.050/1444 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan Banyumas sebesar 69,58 Hektar telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan untuk Tahun 2020 menggunakan SK baru, yaitu SK Bupati Nomor.660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Banyumas.

Luas kawasan kumuh perkotaan Purwokerto berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor.660/630 Tahun 2020 adalah 115,7 hektar, sedangkan luas wilayah Perkotaan Purwokerto adalah 2.362,85 hektar. Penataan kawasan kumuh perkotaan Purwokerto melalui keterpaduan program/kegiatan dan sinergitas sektor-sektor yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman.

Sampai akhir tahun 2020 realisasi capaian penanganan kawasan kumuh hanya tercapai 0,44% dari target 6,09% atau seluas 0,90 hektar sudah tertata (trend menurun). Target tidak tercapai karena, adanya Refocusing Anggaran dan SK Kawasan Kumuh baru terbit di akhir tahun 2020, sehingga Kegiatan Penanganan Kawasan belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2020. Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh yang bisa dilakukan hanya Jasa Konsultansi DED Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Kedungwuluh.

Untuk tahun 2021 Dinperkim menangani Kawasan kumuh seluas 15,38 Ha dengan menangani infrastruktur di wilayah

Karangklesem 5,1 Ha, Purwokerto Kidul 0,57 Ha, Purwokerto Kulon 0,79 Ha, Grendeng 1,61 Ha, Purwanegara 2,42 Ha, Sumampir 4,39 Ha, Kedungwuluh 0,5 Ha

Sedangkan Permukiman yang Layak Huni adalah permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Penyediaan fasilitas umum seperti trotoar pedestrian, penataan makam dan sarana lain yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman adalah salah satu upaya untuk mewujudkan lingkungan yang layak dan serasi sebagaimana yang diinginkan dalam

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **PERANGKAT DAERAH**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah, Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan

- perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
3. pembinaan dan/atau fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
  4. supervisi dan/atau monitoring kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
  5. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
  6. evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
  7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dalam rancangan awal RKPD sebenarnya sudah cukup memadai, beberapa program disinkronisasi dengan program pada tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Program dan kegiatan yang ada disusun guna mendukung sepenuhnya pencaipain standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan

Tabel 2. 3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
RKA-BELANJA SKPD**

**Formulir**

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Uraian	Sumber Dana	Jumlah T-1	JUMLAH					
								T					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
1	03				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			32,387,019,000	3,139,130,000	0	0	35,526,149,000	
1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			11,617,000,000	0	0	0	11,617,000,000	
1	03	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			11,617,000,000	0	0	0	11,617,000,000	
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,122,000,000	0	0	0	1,122,000,000	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,835,000,000	0	0	0	1,835,000,000	
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,600,000,000	0	0	0	6,600,000,000	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,960,000,000	0	0	0	1,960,000,000	
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000	0	0	0	100,000,000	
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			17,290,949,000	0	0	0	17,290,949,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Jumlah T-1	JUMLAH				
								T				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	03	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			17,290,949,000	0	0	0	17,290,949,000
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		17,190,949,000	0	0	0	17,190,949,000
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (PALD))	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000	0	0	0	100,000,000
1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>			291,164,000	1,415,136,000	0	0	1,706,300,000
1	03	06	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			291,164,000	1,415,136,000	0	0	1,706,300,000
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		291,164,000	1,415,136,000	0	0	1,706,300,000
1	3	7			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>			2,000,206,000	1,723,994,000	0	0	3,724,200,000
1	03	07	2.01		<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>			2,000,206,000	1,723,994,000	0	0	3,724,200,000
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota		700,206,000		1,723,994,000	0	0	2,424,200,000
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		1,300,000,000		0	0	0	1,300,000,000
1	3	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		1,187,700,000		0	0	0	1,187,700,000
1	03	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>		362,800,000		0	0	0	362,800,000
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan, Persetujuan Substansi, Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW		362,800,000		0	0	0	362,800,000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Jumlah T-1	JUMLAH				
								T				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	03	12	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		600,000,000		0	0	0	600,000,000
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	600,000,000		0	0	0	600,000,000
1	03	12	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		124,900,000		0	0	0	124,900,000
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	124,900,000		0	0	0	124,900,000
1	03	12	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		100,000,000		0	0	0	100,000,000
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	PAD	100,000,000		0	0	0	100,000,000
1	04				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		13,114,676,000		934,961,000	0	0	14,049,637,000
1	04	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		8,684,591,000		363,346,000	0	0	9,047,937,000
1	04	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		115,000,000		0	0	0	115,000,000
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen		45,000,000		0	0	0	45,000,000
					Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
					(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	(PAD)						
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN	70,000,000		0	0	0	70,000,000
						ASLI DAERAH (PAD)						



Kode					Uraian	Sumber Dana	Jumlah T-1	JUMLAH				
1	2	3	4	5				6	7	9	T	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	4	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>5,955,083,034</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,955,083,034</b>
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Dana Transfer/DAU	5,710,083,034		0	0	0	5,710,083,034
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD	245,000,000		0	0	0	245,000,000
1	4	1	2,1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>274,970,726</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,970,726</b>
1	04	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6,000,000		0	0	0	6,000,000
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN	100,000,000		0	0	0	100,000,000
						ASLI DAERAH (PAD)						
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PENDAPATAN	30,000,000		0	0	0	30,000,000
						ASLI DAERAH (PAD)						
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		138,970,726		0	0	0	138,970,726
1	04	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>2,500,000</b>		<b>363,346,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365,846,000</b>
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	2,500,000		363,346,000	0	0	365,846,000
1	4	1	2,1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2,167,037,240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,167,037,240</b>
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	190,000,000		0	0	0	190,000,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD	1,977,037,240		0	0	0	1,977,037,240

Kode					Uraian	Sumber Dana	Jumlah T-1	JUMLAH				
1	2	3	4	5				6	7	9	T	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
					(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)							
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>170,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000,000</b>
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		82,500,000		0	0	0	82,500,000
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	PAD	7,500,000		0	0	0	7,500,000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	70,000,000		0	0	0	70,000,000
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD	10,000,000		0	0	0	10,000,000
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		<b>55,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>		<b>30,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	30,000,000		0	0	0	30,000,000
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>		<b>25,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	25,000,000		0	0	0	25,000,000
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		<b>461,485,000</b>		<b>571,615,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,033,100,000</b>
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>		<b>461,485,000</b>		<b>571,615,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,033,100,000</b>

Kode					Uraian	Sumber Dana	Jumlah T-1	JUMLAH				
1	2	3	4	5				6	7	9	T	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	PAD	200,000,000		571,615,000	0	0	771,615,000
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	246,485,000		0	0	0	246,485,000
1	04	03	2.02	09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat Kepemilikan Rumah	PAD	15,000,000		0	0	0	15,000,000
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>		<b>3,773,400,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,773,400,000</b>
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3,773,400,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,773,400,000</b>
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	3,773,400,000		0	0	0	3,773,400,000
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		<b>140,200,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,200,000</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>		<b>140,200,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,200,000</b>
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	PAD	40,000,000		0	0	0	40,000,000
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	100,200,000		0	0	0	100,200,000
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2</b>	<b>10</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>		<b>221,000,000</b>		<b>54,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,000,000</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>221,000,000</b>		<b>54,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,000,000</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2.01</b>		<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>221,000,000</b>		<b>54,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,000,000</b>

Kode					Uraian	Sumber Dana	Jumlah T-1	JUMLAH				
1	2	3	4	5				6	7	9	T	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	70,000,000		30,000,000	0	0	100,000,000
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	PAD	151,000,000		24,000,000	0	0	175,000,000

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2017, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005–2025, dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 dan RKPD Kabupaten Banyumas 2022.

Sasaran jangka menengah SKPD merupakan Sasaran strategis (*outcome/impact*) dalam hal ini kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Visi Kementerian PUPR yaitu

*“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.*

Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of growth), namun juga bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan carrying capacity suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging growth center) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, melalui pengurangan urbanisasi dan urban sprawl, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2022 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar-daerah, antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

- 1) Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- 2) Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang

berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan.

- 3) Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan



daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

**3) *Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;***

4) Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5) Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar-daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
- 2) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 3) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- 4) ***Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;***
- 5) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar- daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customer) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**1) Tujuan 1 :**

Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

**Tujuan 1** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;
- b) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
- c) Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

**2) Tujuan 2 :**

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

**Tujuan 2** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a) Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b) Meningkatnya ketahanan air.

**3) Tujuan 3 :**

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

**Tujuan 3** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
- b) Meningkatnya kemantapan jalan nasional;

**4) Tujuan 4 :**

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.

**Tujuan 4** akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- b) Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
- c) Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

**5) Tujuan 5 :**

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta

penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

**Tujuan 5** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
- b) Meningkatnya SDM yang kompeten dan berkelanjutan;
- c) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
- d) Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;
- e) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode Renstra. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 .

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur perumahan dan permukiman dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan produktif, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan disertai dengan penyediaan informasi mengenai tata ruang yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang ;
2. Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni .

Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan Sasaran strategis (outcome/impact) dalam hal ini kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

1. Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW ;
2. Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang tertata ;
3. Meningkatnya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar ;

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil – Makmur dan Mandiri”***

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Maju**

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya.

## **2. Adil-Makmur**

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

## **3. Mandiri**

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

### **1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat

berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

**2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

**3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

**4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

**5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan



pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

**6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

**7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal**

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

**8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.**

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada masa Renstra tahun

2018-2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

**MISI 2 (RPJMD)** : Meningkatkan Kualitas Hidup Warga Terutama Pemenuhan dan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan;

**MISI 5 (RPJMD)** : Menciptakan Iklim Investasi Yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja Yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;

**MISI 6 (RPJMD)** : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai Sebagai Daya Ungkit Pembangunan;

Uraian dari ketiga Misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; yaitu berupa penyediaan sarana sanitasi (drainase dan limbah permukiman), air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang berhubungan dengan konteks perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan kebutuhan dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata; memperbanyak Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak;
2. Menyediakan informasi tentang tata ruang yang akurat, terbuka dan akuntabel untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang;
3. Menyediakan pelayanan perencanaan, pelaporan OPD, administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan.

Dinperkim mempunyai 11 program dan 21 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh empat bidang dan secretariat dan 1 UPTD. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2023 yaitu Rp . 49.850.786.000 M dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp.23.335.786.000 dan APBN Rp. 26.515.000.000.

Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 pada table Table .3.1

**Tabel 3. 1 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
 Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
 Kabupaten Banyumas  
 Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n				Tolok Ukur	Target				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	3								35,426,149,000				38,385,277,200				
1	3	3								11,617,000,000				12,509,000,000			
1	3	3	2	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>							11,617,000,000				12,509,000,000		
1	0 3	0 3	2 0 1	0 2	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Jumlah Konsultasi Supervis Pembangunan/ Peningk ata SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	77.08	50 Dokumen	77.08 %	1,122,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	77.08 %	1,524,000,000
1	0 3	0 3	2 0 1	0 4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan	Kab. Banyumas Kedungbanteng Kalisalak Kab. Banyumas Purwokerto Selatan, Tanjung	77.08 %	330 SR	77.08 %	1,835,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	77.08 %	1,935,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota								terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota		
1030205	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota		77.08	11.88 Liter/D	77.08 %	6,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	77.08 %	6,900,000,000
1030207	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota		77.08 %	352 SR	77.08 %	1,960,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	77.08 %	2,000,000,000
1030201	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkatkan kinerjanya	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota		77.08 %	5 Penyeleng SPAM	77.08 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	77.08 %	150,000,000
135	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>								<b>17,190,949,000</b>					
1352	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>17,190,949,000</b>					
1030206	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Kab. Banyumas Sumbang,	92 %	2198 Rumah Tangga	92 %	17,190,949,000	DAK Fisik-Bidang		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	92 %	17,978,077,200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pengolahan Setempat				Karangturi Kab. Banyumas Kedungbanteng Kedungbanteng Kab. Banyumas Purwokerto Timur, Sokanegara						Sanitasi-Reguler			
<b>1 3 6</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>							<b>1,706,300,000</b>				<b>1,906,300,000</b>	
<b>1 3 6 2</b>		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>1,706,300,000</b>				<b>1,906,300,000</b>	
1 0 0 2 1 3 6 0 2 1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Pabuaran Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Karangwangkal	11.63 %	2000 m	11.63 %	1,706,300,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	11.63 %	1,906,300,000
<b>1 3 7</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>							<b>3,724,200,000</b>				<b>4,424,200,000</b>	
<b>1 3 7 2</b>		<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>3,724,200,000</b>				<b>4,424,200,000</b>	
1 0 0 2 0 3 7 0 1 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Permukiman Layak Huni	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Permukiman Layak Huni	Kab. Banyumas, Sumpiuh, Kebokura Kab. Banyumas, Sumpiuh, Kradenan Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Karangklesem Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh Kab.	80.10 %	30 Sistem Jaringan	80.1 %	2,424,200,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Permukiman Layak Huni	80.10 %	2,924,200,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Banyumas, Purwokerto Selatan, Karangpucung Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor									
1030702	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Permukiman Layak Huni	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Permukiman Layak Huni		80.10 %	15 Sistem Jaringan	80.1 %	1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Permukiman Layak Huni	80.10 %	1,500,000,000
1312	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>								<b>1,187,700,000</b>					<b>1,567,700,000</b>
1312	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>								<b>362,800,000</b>					<b>462,800,000</b>
1031201	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan		100 %	2 Dokumen	100 %	362,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	100 %	462,800,000
1312	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>600,000,000</b>					<b>800,000,000</b>
1031202	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	2 Dokumen	100 %	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	100 %	800,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 3 1 2 2		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>124,900,000</b>				<b>154,900,000</b>
1 0 3 2 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	450 Dokumen	n100 %	124,900,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	100 %	154,900,000
1 3 1 2 2		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>100,000,000</b>				<b>150,000,000</b>
1 0 3 2 0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	12 Dokumen	100 %	100,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	100 %	150,000,000
1 4 1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>14,049,637,000</b>				<b>15,697,489,954</b>
1 4 1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								<b>9,047,937,000</b>				<b>10,152,389,954</b>
1 4 1 2		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>115,000,000</b>				<b>165,000,000</b>
1 0 4 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	30 Dokumen	100 %	45,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	55,000,000
1 0 4 1 0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	5 Laporan	100 %	70,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	110,000,000
1 4 1 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>5,955,083,034</b>				<b>6,215,509,034</b>
1 0 4 1 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	50 Orang/bu	100 %	5,710,083,034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	5,910,083,034
1 0 4 1 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	28 Dokumen	100 %	245,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	305,426,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 4 1 2 : 1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>274,970,726</b>			<b>809,000,500</b>		
1 0 0 2 4 1 0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	3 Paket	100 %	6,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	13,807,200
1 0 0 2 4 1 0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	47 Paket	100 %	100,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	289,614,600
1 0 0 2 4 1 0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	12 Paket	100 %	30,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	40,232,500
1 0 0 2 4 1 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	115 Laporan	100 %	138,970,726	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	465,346,200
1 4 1 2 : 1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>365,846,000</b>			<b>384,346,000</b>		
1 0 0 2 4 1 0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	23 Unit	100 %	365,846,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	100 %	384,346,000
1 4 1 2 : 1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>2,167,037,240</b>			<b>2,225,527,920</b>		
1 0 0 2 4 1 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	64 Laporan	100 %	190,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	208,494,000
1 0 0 2 4 1 0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	84 Laporan	100 %	1,977,037,240	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	100 %	2,017,033,920

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 4 1 2 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								170,000,000			353,006,500	
1 4 1 2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	28 Unit	100 %	82,500,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	100 %	166,936,000
1 4 1 2 5	Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	10 Unit	100 %	7,500,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	100 %	10,096,900
1 4 1 2 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	192 Unit	100 %	70,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	100 %	74,998,000
1 4 1 2 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	1 Unit	100 %	10,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	100 %	100,975,600
1 4 2		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>								<b>55,000,000</b>			<b>85,000,000</b>	
1 4 2 2		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>								<b>30,000,000</b>			<b>55,000,000</b>	
1 4 2 2 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	100 %	25 Dokumen	100 %	30,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100 %	55,000,000
1 4 2 2		<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>								<b>25,000,000</b>			<b>30,000,000</b>	
1 4 2 2 1	Sosialisasi Standar	Persentase ketersediaan rumah bagi korban	Jumlah Orang/Sukarelawan	Persentase ketersediaan	Kab. Banyumas,	100 %	100 Orang	100 %	25,000,000	PENDA PATAN		Persentase ketersediaan	100 %	30,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	02	Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	bencana atau relokasi program kabupaten/kota	yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Purwokerto Selatan, Tanjung					ASLI DAERAH (PAD)		rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		
143		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>1,033,100,000</b>				<b>1,334,100,000</b>	
1432		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>								<b>1,033,100,000</b>				<b>1,334,100,000</b>	
143202	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	9.75 %	1 Dokumen	9.75 %	771,615,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	9.75 %	971,615,000
143202	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	9.75 %	4 Laporan	9.75 %	246,485,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	9.75 %	346,485,000
143202	09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	9.75 %	50 Keluarga	9.75 %	15,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	9.75 %	16,000,000
144		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>								<b>3,773,400,000</b>				<b>3,951,000,000</b>	
1442		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>3,773,400,000</b>				<b>3,951,000,000</b>	
144201	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	Cakupan Ketersediaan	Kab. Banyumas, Purwokerto	77.58 %	300 Unit Rumah	77.58 %	3,773,400,000	PENDA PATAN ASLI		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	77.58 %	3,951,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Rumah Layak Huni	Selatan, Tanjung						DAERAH (PAD)						
1	4	5		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>					<b>140,200,000</b>				<b>175,000,000</b>				
1	4	5	2	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>					<b>140,200,000</b>				<b>175,000,000</b>				
1	0	0	2	0	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	96.30 %	10 Dokumen	96.3 %	40,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	96.30 %	60,000,000
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Karangpucung	96.30 %	23 Laporan	96.3 %	100,200,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	96.30 %	115,000,000
2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>					<b>275,000,000</b>				<b>340,000,000</b>				
2	1	1		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>					<b>275,000,000</b>				<b>340,000,000</b>				
2	1	1	2	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>275,000,000</b>				<b>340,000,000</b>				
2	1	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	39.47 %	4 Laporan	39.4 %	100,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	39.47 %	150,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 1 0 1 0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	39.47 %	2 Dokumen	39.4 %	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	39.47 %	190,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>49,750,786,000</b>				<b>54,422,767,154</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1 3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>													
1 3 5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>													
1 3 5 2	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>													
1 0 3 0 5 1 4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Tanjung	92 %	360 Rumah Tangga	92 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	92 %	105,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>100,000,000</b>				<b>105,000,000</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

**Matrik Tahun 2023 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**

**Tabel 4. 1 Matrik Tahun 2023 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
<b>1</b>												
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>1</b>	<b>3</b>							<b>35,426,149,000</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>						<b>11,617,000,000</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>					<b>11,617,000,000</b>				
1	0	0	2	0	Supervisi	Persentase jumlah rumah	Jumlah Konsultasi Supervis	Persentase jumlah	77.08 %	50 Dokumen	77.08 %	1,122,000,000
	3	3	0	2	Pembangunan/Peningkata n/ Perluasan/Perbaikan SPAM	tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Pembangunan/Peningkata SPAM	rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota				
1	0	0	2	0	Pembangunan SPAM	Persentase jumlah rumah	Jumlah sambungan rumah	Persentase jumlah	77.08 %	330 SR	77.08 %	1,835,000,000
	3	3	0	4	Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota				
1	0	0	2	0	Peningkatan SPAM	Persentase jumlah rumah	Peningkatan Kapasitas SPAM	Persentase jumlah	77.08 %	11.88 Liter/D	77.08 %	6,600,000,000
	3	3	0	5	Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan	IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
		terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota		terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota						
1 3 0 1	0 3 2 7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	77.08 %	352 SR	77.08 %	1,960,000,000	
1 3 0 1	0 3 2 4	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	77.08 %	5 Penyeleng SPAM	8 % 77.0	100,000,000	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>						<b>17,190,949,000</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>17,190,949,000</b>
1 3 0 1	0 5 2 6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	92	2198 Rumah Tangga	92 %	17,190,949,000	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>						<b>1,706,300,000</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>1,706,300,000</b>
1 3 0 1	0 6 2 1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	11.63 %	2000 m	11.63 %	1,706,300,000	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>						<b>3,724,200,000</b>	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>		<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>3,724,200,000</b>		
1	0	0	2	0	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Permukiman Layak Huni	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Permukiman Layak Huni	80.10 %	30 Sistem Jaringan	80.1 %	2,424,200,000
1	0	0	2	0	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Permukiman Layak Huni	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Permukiman Layak Huni	80.10 %	15 Sistem Jaringan	80.1 %	1,300,000,000
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>					<b>1,187,700,000</b>		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>					<b>362,800,000</b>		
1	0	1	2	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan	100 %	2 Dokumen	100 %	362,800,000
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>600,000,000</b>		
1	0	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	100 %	2 Dokumen	100 %	600,000,000
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>124,900,000</b>		
1	0	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	100 %	450 Dokume	n100 %	124,900,000
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>100,000,000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1 0 3 2 0 4	0 1 2 0 4	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	100 %	12 Dokumen	100 %	100,000,000
<b>1 4</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>14,049,637,000</b>	
<b>1 4 1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>9,047,937,000</b>	
<b>1 4 1 2</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>115,000,000</b>	
1 0 4 1 0 1	0 0 2 1 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	30 Dokumen	100 %	45,000,000
1 0 4 1 0 1	0 0 2 1 0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5 Laporan	100 %	70,000,000
<b>1 4 1 2</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>5,955,083,034</b>	
1 0 4 1 0 2	0 0 2 1 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	50 Orang/bu	100 %	5,710,083,034
1 0 4 1 0 2	0 0 2 1 0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	28 Dokumen	100 %	245,000,000
<b>1 4 1 2</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>274,970,726</b>	
1 0 4 1 0 6	0 0 2 1 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3 Paket	100 %	6,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1 4 0 2 0	0 1 . 0 6	0 2 . 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	47 Paket	100 %	100,000,000
1 4 0 2 0	0 1 . 0 6	0 2 . 0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	12 Paket	100 %	30,000,000
1 4 0 2 0	0 1 . 0 6	0 2 . 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	115 Laporan	100 %	138,970,726
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>365,846,000</b>
1 4 0 2 0	0 1 . 0 7	0 2 . 0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	23 Unit	100 %	365,846,000
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>2,167,037,240</b>
1 4 0 2 0	0 1 . 0 8	0 2 . 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	64 Laporan	100 %	190,000,000
1 4 0 2 0	0 1 . 0 8	0 2 . 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	84 Laporan	100 %	1,977,037,240
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>170,000,000</b>
1 4 0 2 0	0 1 . 0 9	0 2 . 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	28 Unit	100 %	82,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	Dinas Operasional atau Lapangan							
1 4 0 1 2 0 5	Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	10 Unit	100 %	7,500,000
1 4 0 1 2 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	192 Unit	100 %	70,000,000
1 4 0 1 2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Dinperkim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	1 Unit	100 %	10,000,000
<b>1 4 2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>							<b>55,000,000</b>
<b>1 4 2 2</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>							<b>30,000,000</b>
1 4 0 2 2 0 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100 %	25 Dokumen	100 %	30,000,000
<b>1 4 2 2</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>							<b>25,000,000</b>
1 4 0 2 2 0 1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100 %	100 Orang	100 %	25,000,000
<b>1 4 3</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>1,033,100,000</b>
<b>1 4 3 2</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>							<b>1,033,100,000</b>
1 4 0 3 2 0 2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	9.75 %	1 Dokumen	9.75 %	771,615,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 0 4 0 2	0 3 0 2 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	9.75 %	4 Laporan	9.75 %	246,485,000
1 0 4 0 2	0 3 0 2 9	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	9.75 %	50 Keluarga	9.75 %	15,000,000
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>						<b>3,773,400,000</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>3,773,400,000</b>
1 0 4 0 1	0 4 0 1 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	77.58 %	300 Unit Rumah	77.58 %	3,773,400,000
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>						<b>140,200,000</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>						<b>140,200,000</b>
1 0 4 0 1	0 5 0 1 1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	96.30 %	10 Dokumen	96.3 %	40,000,000
1 0 4 0 1	0 5 0 1 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	96.30 %	23 Laporan	96.3 %	100,200,000
<b>2</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						<b>275,000,000</b>	
2	1	1			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>						<b>275,000,000</b>	
2	1	1	2		<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>275,000,000</b>	
2	1	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	39.47 %	4 Laporan	39.4 %	100,000,000
2	1	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	39.47 %	2 Dokumen	39.4 %	175,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>49,750,786,000</b>	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
1	3				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>100,000,000</b>	
1	3	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>						<b>100,000,000</b>	
1	3	5	2		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>100,000,000</b>	
1	0	0	2	1	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	92 %	360 Rumah Tangga	92 %	100,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>100,000,000</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran serta pagu indikatif dan perkiraan maju yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinperkim Tahun 2022. Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pmda maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( KUA-APBD) Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023, Adapun kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Kabupaten Banyumas menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada akhirnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banyumas selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS



**BEDY NOERHASAN, ST.,M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710209 199803 1 003